

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta; Gustav Radbruch, Rechtsphilosophie.
- Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 5.
- buku Ajar Hukum Pidana, menguraikan syarat pertanggungjawaban pidana termasuk kemampuan bertanggung jawab, hubungan batin berupa dolus atau culpa, dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan (toerekeningsvatbaarheid dan schuld uitsluitingsgrond).
- Diar, A. (2022). Perbandingan penyelesaian perkara korupsi delik suap antara Indonesia dan Belanda. CV. Azka Pustaka.
- Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 9–14.
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 57.
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 122.
- Kenedi, J. (2017). Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia. Pustaka Pelajar.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 1 ayat (1); Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 165.
- Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Bandung: Mandar Maju, 2004, hlm. 55–60.
- Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 154. 3Peter Muhmud Marzuki, op, cit, hlm 93.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 23
- Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 91–92.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Zaidan, M. A., & Sh, M. (2021). *Kebijakan kriminal*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

Zaidan, M. A., & Sh, M. (2021). *Kebijakan kriminal*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

Kenedi, J. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar.

Jurnal/Artikrel

Satoto, W. (2024). *Politik Hukum Pidana Dalam Penyelenggaran Pemerintahan Daerah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Pasmatuti, D. (2019). *Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. *Ensiklopedia Social Review*, 1(1).

Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). *Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif dampak serta upaya pemberantasan*. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177-191.

Aiman, R. (2024). *Hukum dan korupsi: Tantangan dan solusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia*. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3(1), 16-30.

Lembong, T. *Abolisi dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus*.

Kasman, M. (2025). *Tuduhan Pelanggaran Wewenang dalam Kasus Korupsi Tom Lembong: Perspektif Hukum*. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 168-176.

Fausi, A. (2024). *Formulasi Konsepputusan Berkeadilan Padatitel Eksekutorialdan Relevansi Nilai Etiknya terhadap Pemberantasan Korupsi Yudisial* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Sitti, S. N. (2013). *Kedudukan Lembaga Negara Ad Hoc Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Doctoral dissertation, Uniniversitas Hasanuddin).

Dewi, R. C., & Murdiana, E. *Strategi Reformasi Sistem Hukum*.

Pratama, A. (2020). *Analisis Yuridis Operasi Tangkap Tangan yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

- Kusumawati, A. (2023). Analisis Hukum Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Putusan Nomor: 20/Pid. B/2020/PN Spt (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Tampoli, D. C. M. (2016). Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana. *Lex Privatum*, 4(2).
- Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J. (2024). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 12-25.
- Astiti, Y. (2024). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berbasis Keadilan Substantif (Studi Putusan No. 667/Pid. Sus/2022/Pn Smg) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Kila, F., Sugiarta, I. N. G., & Ujianti, N. M. P. (2023). Pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 28-34.
- Lewokeda, M. D. (2018). Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan. *Mimbar Keadilan*, 14(28).
- Shafrudin, S. (2009). PELAKSANAAN POLITIK HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).
- Sumeleh, E. J. (2017). Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Perspektif Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Lex Administratum*, 5(9).

WEBSITE

<https://ugm.ac.id/id/berita/pakar-hukum-ugm-soroti-pemberian-amnesti-dan-abolisi-pada-terdakwa-korupsi>

<https://www.antaranews.com/berita/5005841/dpr-setujui-permohonan-pemberian-abolisi-terhadap-tom-lembong>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/za06695084bc9a4a12c303734343332.html>

Hukumonline, “Mengenal Konsep Amnesti dan Abolisi yang Diberikan kepada Hasto dan Tom Lembong”, diakses melalui [artikel Hukumonline](#) pada tanggal 5 Mei 2026.

<https://ugm.ac.id/id/berita/pakar-hukum-ugm-soroti-pemberian-amnesti-dan-abolisi-pada-terdakwa-korupsi>

Samosir, H. A., & Tim Kompas. (2025, 1 Agustus). *Negara ampuni Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto*. Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/negara-ampuni-tom-lembong-dan-hasto-kristiyanto>

UNDANG UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 14 ayat (2);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi; Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.